

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 21, No. 4, Desember 2016

ISSN 0853-9316

- **PENYELENGGARAAN PILKADA DAN LEMAHNYA SIRKULASI ELIT POLITIK LOKAL**
oleh: Prayudi
- **POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PROGRAM SIARAN TELEVISI**
oleh: Denico Doly
- **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA PERIKANAN TANGKAP INDONESIA**
oleh: Lukman Adam
- **PERKEMBANGAN, TANTANGAN DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BALI SEBAGAI INTERMEDIASI KEUANGAN**
oleh: Mandala Harefa
- **PERSEPSI MASYARAKAT DAN ANALISIS WILLINGNESS TO PAY TERHADAP KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR STUDI DI JAKARTA DAN BANDUNG**
oleh: Anih Sri Suryani



Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 21, No. 4, Desember 2016

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i-ii
● PENYELENGGARAAN PILKADA DAN LEMAHNYA SIRKULASI ELIT POLITIK LOKAL <i>oleh: Prayudi</i>	275-296
● POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PROGRAM SIARAN TELEVISI <i>oleh: Denico Doly</i>	297-319
● KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA PERIKANAN TANGKAP INDONESIA <i>oleh: Lukman Adam</i>	321-338
● PERKEMBANGAN, TANTANGAN DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BALI SEBAGAI INTERMEDIASI KEUANGAN <i>oleh: Mandala Harefa</i>	339-357
● PERSEPSI MASYARAKAT DAN ANALISIS WILLINGNESS TO PAY TERHADAP KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR STUDI DI JAKARTA DAN BANDUNG <i>oleh: Anih Sri Suryani</i>	359-376

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Kajian edisi bulan Desember 2016 menyajikan 5 (lima) tulisan dengan latar belakang ilmu yang bervariasi. Kelima tulisan ini merupakan hasil seleksi dari 6 (enam) karya tulis ilmiah yang masuk ke redaksi. Kelima tulisan itu diawali dengan tulisan Prayudi tentang penyelenggaraan pilkada dan lemahnya sirkulasi elit politik lokal. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang membahas penyelenggaraan pilkada belum mendorong sirkulasi elit politik lokal secara demokratis. Hasil penelitian penulis dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus terhadap dua daerah, yaitu Jambi dan Sulut saat Pilkada serentak 2015, menunjukkan gejala tersebut. Temuan di lapangan menunjukkan belum optimalnya instrumen sirkulasi elit melalui pilkada adalah diakibatkan oleh hubungan yang kurang kondusif antara KPU dan Panwas setempat, dominasi pragmatisme jalur pencalonan melalui partai, kuatnya oligarki elit pusat campur tangan terhadap politik lokal, dan ikatan emosional dinasti kerabat, menempatkan pilkada belum mampu menghasilkan regenerasi kepemimpinan pemda yang demokratis.

Tulisan kedua adalah kajian tentang politik hukum perlindungan anak terhadap program siaran televisi yang ditulis oleh Denico Doly. Tulisan ini berdasarkan penelitian yang menyatakan kehadiran televisi di tengah kehidupan masyarakat menjadi kebutuhan sehari-hari yang tidak pernah luput dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak terhadap aksesibilitas masyarakat untuk menonton televisi. Anak-anak merupakan salah satu subjek yang menonton siaran televisi baik itu untuk mengakses informasi, hiburan, maupun pendidikan. Akan tetapi saat ini masih banyak materi isi siaran yang belum sesuai dengan kategori anak atau sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat. UU Penyiaran sudah mengatur tentang perlindungan anak terhadap isi siaran, akan tetapi sampai dengan saat ini aturan tersebut belum dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan upaya secara preventif maupun represif untuk melindungi anak-anak dari isi siaran yang tidak ramah anak, sehingga seorang anak dapat menonton isi siaran yang layak.

Berikutnya tulisan dari Lukman Adam yang membahas tentang kebijakan perlindungan pekerja perikanan tangkap Indonesia. Penulis berpendapat sejumlah langkah perlindungan harus diberikan negara pada warga negaranya yang bekerja di sub-sektor ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indonesia, salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Perikanan Tangkap sehingga kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan pada pekerja perikanan tangkap saat ini belum memadai. Dengan meratifikasi konvensi ILO tersebut akan memastikan awak kapal perikanan tangkap mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal; standar-standar persyaratan layanan; akomodasi dan makanan; perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; perawatan kesehatan dan jaminan sosial.

Tulisan keempat merupakan hasil penelitian dari Mandala Harefa tentang perkembangan dan tantangan lembaga perkreditan desa (LPD) Bali sebagai intermediasi keuangan. LPD Bali pada tahun 2014 telah mencapai 1.421 unit dengan total aset mencapai Rp11,4 triliun yang tersebar hampir di seluruh Desa Pakraman (Desa Adat). LPD sebagai lembaga keuangan mikro berkembang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dihimpun telah mencapai Rp12,5 triliun. Namun demikian dengan perkembangan LPD tersebut muncul kendala terkait masalah standar pengelolaan untuk menjamin dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat desa di Bali. Untuk menjamin dana tersebut perlu dibentuk suatu badan yang bekerja sama yang melibatkan Lembaga Pembinaan LPD, BPD Bali, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tulisan kelima merupakan hasil penelitian dari Anih Sri Suryani tentang persepsi masyarakat dan analisis *willingness to pay* (WTP) terhadap kebijakan kantong plastik berbayar studi di Jakarta dan Bandung. Sampah plastik di Indonesia menimbulkan permasalahan yang kian rumit dari tahun ke tahun. Untuk itu pemerintah telah melakukan uji coba kebijakan kantong plastik berbayar di beberapa kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat setuju apabila sampah plastik dikelola dengan baik. Namun jumlah masyarakat yang setuju pengenaan tarif pada kantong plastik dan tidak setuju pengenaan tarif jumlahnya relatif berimbang. Besaran WTP masyarakat akan kantong plastik berbayar ini relatif lebih besar dari harga kantong plastik yang pernah diujicobakan, yakni >Rp.1000,-. Berdasarkan analisis regresi, faktor yang mempengaruhi besaran WTP masyarakat adalah usia dan tempat masyarakat biasa melakukan belanja bulanan.

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian edisi bulan Desember 2016. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. I Wayan Rusastra, M.S., Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Dwi Purwoko, dan Drs Dr. Lili Romli, M.Si, sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Desember 2016

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Prayudi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

PENYELENGGARAAN PILKADA DAN LEMAHNYA SIRKULASI ELIT POLITIK LOKAL

Kajian Vol. 21, No. 4, Tahun 2016, hlm. 275-296

Penyelenggaraan Pilkada belum mendorong sirkulasi elit politik lokal secara demokratis. Hasil penelitian penulis dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus terhadap dua daerah, yaitu Jambi dan Sulut saat Pilkada serentak 2015, menunjukkan gejala tersebut. Secara teoritis, sirkulasi elit politik merupakan substansi penting demokrasi yang tidak saja terkait lembaga politik pencalonannya, baik melalui jalur partai atau jalur perseorangan. Tetapi substansi ini juga ditentukan dari sudut penyelenggaranya, yaitu dari KPU dan pengawas pilkada. Temuan lapangan belum optimalnya instrumen sirkulasi elit melalui pilkada adalah diakibatkan oleh hubungan yang kurang kondusif antara KPU dan Panwas setempat, dominasi pragmatisme jalur pencalonan melalui partai, kuatnya oligarki elit pusat campur tangan terhadap politik lokal, dan ikatan emosional dinasti kerabat, menempatkan pilkada belum mampu menghasilkan regenerasi kepemimpinan pemda yang demokratis. *Status quo* masih membayangi sirkulasi elit di tengah harapan tinggi bagi adanya tanggungjawab pemerintahan daerah terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Kata kunci: elit politik, pilkada serentak, pemerintahan daerah, penyelenggara, dinasti politik, jalur partai, jalur perseorangan pilkada.

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PROGRAM SIARAN TELEVISI

Kajian Vol. 21, No. 4, Tahun 2016, hlm. 297-319

Kehadiran televisi di tengah kehidupan masyarakat menjadi kebutuhan sehari-hari yang tidak pernah luput dari kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi memberikan dampak terhadap aksesibilitas masyarakat untuk menonton televisi. Televisi saat ini dapat ditonton oleh masyarakat melalui berbagai perangkat elektronik. Mudah-mudahan akses untuk menonton siaran televisi membuat anak-anak menjadi salah satu subjek pengakses informasi, hiburan, maupun pendidikan. Namun, saat ini masih banyak materi isi siaran yang belum sesuai dengan kategori anak atau sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat. Sekalipun UU Penyiaran mengatur tentang perlindungan anak terhadap isi siaran, sampai dengan saat ini, aturan tersebut belum dapat berjalan dengan baik. Masih banyak siaran yang tidak ramah anak. Hukum dibuat untuk memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat, termasuk anak-anak.

Kata kunci: perlindungan anak, siaran televisi, perlindungan hukum, program televisi, UU Penyiaran.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA PERIKANAN TANGKAP INDONESIA

Kajian Vol. 21, No. 4, Tahun 2016, hlm. 321-338

Pekerjaan di perikanan tangkap merupakan salah satu jenis pekerjaan berisiko tinggi. Sejumlah langkah perlindungan harus diberikan negara pada warga negaranya yang bekerja di sub-sektor ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indonesia, salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Perikanan Tangkap. Walaupun Indonesia telah memiliki kebijakan yang berlaku secara nasional yang bertujuan memberikan perlindungan pada pekerja perikanan tangkap, namun belum memadai. Sehingga langkah untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 merupakan sebuah keharusan. Konvensi ILO tersebut bertujuan memastikan awak kapal perikanan tangkap mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal; standar-standar persyaratan layanan; akomodasi dan makanan; perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; perawatan kesehatan dan jaminan sosial. Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan terhadap pekerja perikanan tangkap adalah kebijakan yang bersifat sektoral, lamanya penetapan aturan pelaksana, lemahnya sosialisasi, pendataan dan sertifikasi, penegakkan kebijakan, dan rendahnya perhatian pemerintah. Dukungan kebijakan yang perlu dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan secara menyeluruh, melalui pemenuhan hak dasar dan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas diberikan melalui sejumlah kebijakan fiskal, dukungan operasional, dan akses informasi luas terhadap pemanfaatan sumber daya hasil perikanan. Kebijakan perlindungan pekerja perikanan tangkap seharusnya melibatkan banyak sektor, dan memuat kebijakan ekonomi, hukum, dan sosial.

Kata kunci: risiko tinggi, pekerja perikanan tangkap, faktor penghambat, Konvensi ILO, kebijakan fiskal.

**PERKEMBANGAN, TANTANGAN, DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BALI SEBAGAI INTERMEDIASI KEUANGAN**

Kajian Vol. 21, No. 4, Tahun 2016, hlm. 339-357

Lembaga keuangan mikro di Indonesia sudah berkembang lama, terutama dalam membantu perekonomian masyarakat di pedesaan seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Perannya dalam membentuk usaha mikro dan kecil masih diperlukan guna mendorong perekonomian rakyat di pedesaan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan, peran, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi LPD sebagai salah satu institusi keuangan yang ada di Provinsi Bali. Jumlah LPD pada tahun 2014 telah mencapai 1.421 unit dengan total aset mencapai Rp11,4 triliun yang tersebar hampir di seluruh Desa Pakraman (Desa Adat). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dikompilasi melalui wawancara dan FGD dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam memberikan informasi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa perkembangan LPD sebagai lembaga keuangan mikro berkembang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dihimpun telah mencapai Rp12,5 triliun. Namun demikian dengan perkembangan LPD tersebut muncul kendala terkait masalah standar pengelolaan untuk menjamin dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat desa di Bali. Untuk menjamin dana tersebut perlu dibentuk suatu badan yang bekerja sama yang melibatkan Lembaga Pembinaan LPD, BPD Bali, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kata kunci: keuangan mikro, manajemen risiko kredit, LPD, intermediasi keuangan, Bali.

Anih Sri Suryani (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

**PERSEPSI MASYARAKAT DAN ANALISIS *WILLINGNESS TO PAY* TERHADAP
KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR STUDI DI JAKARTA DAN BANDUNG**

Kajian Vol. 21, No. 4, Tahun 2016, hlm. 359-376

Sampah plastik di Indonesia menimbulkan permasalahan yang kian rumit dari tahun ke tahun. Untuk mengurangi timbunan sampah plastik, pemerintah melakukan ujicoba kebijakan kantong plastik berbayar di beberapa kota. Tulisan ini bertujuan mengkaji persepsi masyarakat dan menghitung *willingness to pay* (WTP) masyarakat akan kebijakan tersebut. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan survey dan penyebaran kuesioner pada masyarakat di DKI Jakarta dan Kota Bandung. Temuan mengungkapkan masyarakat sangat setuju apabila sampah plastik dikelola dengan baik. Namun, jumlah masyarakat yang setuju pengenaan tarif pada kantong plastik dan tidak setuju pengenaan tarif jumlahnya relatif berimbang. Besaran WTP masyarakat akan kantong plastik berbayar relatif lebih besar dari harga kantong plastik yang pernah diujicobakan, yakni >Rp.1000,-. Berdasarkan analisis regresi, faktor yang mempengaruhi besaran WTP masyarakat adalah usia dan tempat masyarakat biasa melakukan belanja bulanan.

Kata kunci: *willingness to pay*, kebijakan kantong plastik berbayar, pengelolaan sampah, Jakarta, Bandung.

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Prayudi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

THE EXECUTION OF REGIONAL HEADELECTIONS AND THE WEAKNESS OF LOCAL ELITE'S CIRCULATION

Kajian Vol. 21, No. 4, Tahun 2016, pp. 275-296

The implementation of regional election doesn't push yet a democratically political elite circulations. Research of the author were used of qualitative methods with case study approach in two area studies, that is in Jambi and North Sulawesi when concurrent election's 2015, showed that tendencies. Theoritically, political elites circulation become an important in democracy, which isn't only be pertaining to institutional nomination of candidate either through parties or individually channels. These substances also determine by the organizer of election, that is KPU's and the supervision of election. The field research found that yet the optimum circulation of elite's cause of an impact of the less-conductive relations among KPU's and local commitees of supervision's, domination of pragmatism nomination channel of parties, an emotional networking of kindship dynasties, deliveran election wasn't to create regional leadership democratically. The status quo still shadowed the circulation of elites in the mid of high expectation toward an accountability of the governance toward people needs.

Keywords: political elite, concurrent elections, organizer, regional governances, political dynasty, individually channel of elections.

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN FROM BROADCASTING PROGRAMS

Kajian Vol. 21, No. 4, Tahun 2016, pp. 297-319

Television has today become important part of public needs. Current development of technology has brought impact on public accessibility to watch television. In fact, television can now be viewed by the public through different electronic devices. Easy access has made possible people to watch live programs, which can be accessed also by children. Importantly, they have become the subject who watches television to gain information, entertainment, and education. However, there are still a lot of broadcast contents that are not in accordance with children needs and criteria, not in accordance with norms in society. Broadcasting Law protects children against irrelevant broadcasting programs, especially mature matters. Nevertheless, the law has not yet been able to consequently implement. There are still many programs which are not in line with children needs. The law itself has been made to secure and provide society, especially children, with nice and friendly programs.

Keywords: child protection, television programs, legal protection, broadcasting, law on broadcasting.

THE PROTECTION OF WORKER CAPTURE FISHERIES POLICY IN INDONESIA

Kajian Vol. 21, No. 4, Tahun 2016, pp. 321-338

Employment in the capture fisheries is one type of high-risk occupations. A number of measures of protection should be given by the state on its citizens working in this sub-sector, both domestically and abroad. Indonesia, one of the countries that have not ratified ILO Convention, 188, of 2007 on captures fisheries employment. Indonesia had a national policy that applies which aims to provide protection to worker capture fisheries, but not yet sufficient. Meanwhile to ratify ILO Convention, 188, 2007, is a must. The ILO Convention aims to ensure the crew's fisheries have decent working conditions on board fishing vessels in terms of minimum requirements for work; standards of service requirements; accommodation and food; protection of health and safety; health care and social security. Resistences factors that cause a lack of effective protection of capture fisheries workers are that sectoral policies, the duration of implementation rules, weakness dissemination, data collection and certification, policy enforcement, and the lack of government attention. Support policies that need to be done by the state are to provide comprehensive protection, through the fulfillment of basic rights and capacity building. Increased capacity provided through a number of fiscal policies, operational support, and access to comprehensive information on the utilization of fishery resources. Worker protection policies capture fisheries should involve many sectors, and includes economic, legal, and social policies.

Keywords: high risk, capture fisheries worker, ILO Convention, resistences factor, fiscal policy.

DEVELOPMENT, CHALLENGE AND POLICY PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF RURAL MICRO FINANCE INSTITUTION OF BALI AS FINANCIAL INTERMEDIATE

Kajian Vol. 21, No. 4, Tahun 2016, pp. 339-357

Micro finance institutions in Indonesia has already established since long time in helping people economy in rural areas, including in Bali. Its role to support micro and small businesses has also showed that those financial institutions become much more needed by rural society to boost their economy. This research aims to know the development and role of micro finance institutions as well as their challenges as one of financial institutions in the Bali Province. The number of micro finance institution, which said as Lembaga Perkreditan Desa in Bali has, in fact, significantly grown by 1.421 units and its asset reached Rp. 11.4 trillion in 2014. This research uses descriptive methods within qualitatives research approach. This research, applied a descriptive qualitative method shows that the micro finance development and its role in Bali is fairly good; this can be seen from the total saving they can collect which reached Rp. 12,5 trillion. Nevertheless, for the sake of the safety of public savings, there is a need to set up a special agent which can cooperate with local government bank, such as Bank Pembangunan Daerah Bali and Otoritas Jasa Keuangan.

Keywords: micro finance, credit risk management, rural credit institutions, finance intermediate, Bali.

Anih Sri Suryani (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

PUBLIC PERCEPTION AND WILLINGNESS TO PAY ANALYSED IN PLASTIC BAG PAID POLICY STUDY IN JAKARTA AND BANDUNG

Kajian Vol. 21, No. 4, Tahun 2016, pp. 359-376

Plastic waste has caused increasingly complex problems from year to year in Indonesia. In an effort to reduce landfill waste plastic, the government introduced a plastic bag paid policy in several cities. This article examine public perception on public willingness to pay (WTP) on use of plastic bag. Quantitative research was conducted by survey and questionnaire in Jakarta and Bandung. Finding shows that people agree that plastic waste should be properly managed. However, the number of people who agree and disagree with the imposition of tariffs on plastic bags are relatively balanced. Also, the amount of society's WTP of a plastic bag is higher than the amount during the trial, namely >Rp1.000,-. Based on regression analysis, this research found that the factors affecting society's WTP amount were the age and the place where people normally do the monthly shopping.

Keywords: willingness to pay, paid plastic bag policy, waste management, Jakarta, Bandung.